

## **BAB I PENDAHULUAN**

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun laporan yang terdiri atas :

- A. Laporan Realisasi Anggaran;
- B. Neraca;
- C. Laporan Operasional;
- D. Laporan Perubahan Ekuitas dan
- E. Catatan atas Laporan keuangan.

### **A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit dan pembiayaan dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya, informasi tersebut berguna bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

### **B. NERACA.**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang di cakup oleh neraca terdiri dari asset, kewajiban dan ekuitas dana masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa dimasa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya,

- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah.

### **C. LAPORAN OPERASIONAL.**

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/deficit dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai :

- a. Besarnya beban yang harus ditanggung oleh entitas akuntansi
- b. Operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- c. Prediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.
- d. Penurunan ekuitas (bila defisit operasional) dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional)

Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggung jawabkan.

### **D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.**

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos pos :

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus / defisit-LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya :
  - 1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode - periode sebelumnya.
  - 2. Perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap.

Disamping itu suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan Perubahan Ekuitas dalam catatan atas laporan keuangan.

## **E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal / keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian kejadian penting lainnya.
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- f. Informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

### **1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk memberikan dan menyajikan laporan pertanggung jawaban sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

### **1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD disusun dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
- i. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
- j. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah ;
- k. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- l. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 73 tahun 2014 tentang Kebijakan akuntansi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.
- m. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 74 tahun 2014 tentang system akuntansi pemerintah daerah,;

### **1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Sistematika penulisan ini dibagi dalam 5 (lima) bab dengan rincian pembahasan sebagai berikut :

- BAB I : Berisi pendahuluan yang membahas secara umum maksud dan tujuan penyusunan Laporan keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan keuangan, Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
- BAB II : Berisi Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan yang membahas secara umum tentang indikator target kinerja keuangan yang terdiri dari indikator makro pembangunan dan indikator bidang-bidang pembangunan serta indikator keberhasilan pembangunan.
- BAB III : Berisi penjelasan pos-pos laporan keuangan yang membahas secara rinci tentang rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, dan serta Pengungkapan atas pos-pos Asset dan kewajiban lain-lain.
- BAB IV : Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD
- BAB V : Penutup

## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROV. SULSEL

#### 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	Realisasi %	
					Fisik	Keu
1	2	3	4	5 (3-4)	6	7
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>12.812.000.000</b>	<b>12.542.654.475</b>	<b>269.345.525</b>	<b>100.00</b>	<b>97,89</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Belanja gaji & Tunjangan	6.388.148.397	6.171.394.490	216.753907,00	100	96.606. 936.884 .8
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.477.274.767,00	4.156.021.665,00	321.253.102,00	100	93.025. 822.218 .8
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>11.888.632.739,00</b>	<b>11.575.633.410,00</b>	<b>312.999.329,00</b>	<b>100</b>	<b>97.367. 238.639 .8</b>
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Adm. Perkantoran</b>	<b>2.133.978.644,66</b>	<b>2.108.636.663.00</b>	<b>25.341.981.66</b>	<b>100</b>	<b>98.812. 453.860 .7</b>
1	Penyediaan Jasa Kantor dan Bahan Pakai Habis	66.704.000,00	66.692.500,00	11.500,00	100	99.982. 759.654 .5
2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	595.055,525.00	594.995.170,00	60.355.00	100	99.989. 857.249
3	Pengelolaan Administrasi Persuratan dan Kepegawaian				100.00	
	<b>Adanya anggaran dari beberapa rekening yang tidak sepenuhnya direalisasikan</b>					
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Dan Kinerja Skpd</b>	<b>1.571.939.200,00</b>	<b>1.484.782.460.00</b>	<b>87.156.740.00</b>	<b>100.00</b>	<b>94.455. 463.671 .8</b>
1	Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana	1.290.870.000	1.243.114.700	47.755.300	100.00	96,30
2	Penatausahaan Administrasi SKPD	300.400.000	298.623.000	1.777.000	100.00	99,40
	<b>Adanya anggaran dari beberapa rekening yang tidak sepenuhnya direalisasikan</b>					
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Sistem Evaluasi Kinerja Skpd</b>	<b>449.375.000</b>	<b>448.348.792</b>	<b>1.028.208</b>	<b>100.00</b>	<b>99,77</b>
1	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	102.353.000	102.159.492	193.508	100.00	99,81
2	Pengelolaan Keuangan dan Program Kegiatan	302.325.000	301.690.300	634.700	100.00	99,79
3	Forum SKPD	44.697.000	44.497.000	200.000	100.00	99,55
	<b>Adanya anggaran dari beberapa rekening yang tidak sepenuhnya direalisasikan</b>					
<b>4</b>	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>3.403.650.000</b>	<b>3.377.011.702</b>	<b>26.638.298</b>	<b>100.00</b>	<b>99,22</b>
1	Pengelolaan Data dan Informasi	187.200.000	184.195.528	3.004.472	100.00	98,39
2	Penyajian Data dan Informasi Melalui Website	370.800.000	366.424.900	4.375.100	100.00	98,82

3	Pemanfaatan dan Pengembangan Infrastruktur Jaringan	824.950.000	817.984.976	6.965.024	100.00	99,15
4	Pemeliharaan Layanan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik	128.400.000	128.187.000	213.000	100.00	99,83
5	Bimtek Pengelolaan Website	191.500.000	190.900.000	600.000	100.00	99,68
6	Sosialisasi Tentang e-Government	175.400.000	174.800.000	600.000	100.00	99,65
7	Penyediaan Jasa Bandwidth Internet	830.100.000	828.760.000	1.340.000	100.00	99,83
8	Penyelenggara Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	209.000.000	206.722.181	2.277.819	100.00	98,91
9	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	113.300.000	111.550.000	1.750.000	100.00	98,45
10	Monitoring Pelaksanaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten/Kota	120.600.000	119.443.000	1.157.000	100.00	99,04
11	Pengelolaan Sistem Pelaporan Pakar Report	121.000.000	118.223.037	2.776.963	100.00	97,70
12	Pengembangan Layanan LPSE	131.400.000	129.821.080	1.578.920	100.00	98,79
<b>Adanya anggaran dari beberapa rekening yang tidak sepenuhnya direalisasikan</b>						
<b>5</b>	<b>Program Pengembangan Data Dan Informatika</b>	<b>503.500.000</b>	<b>500.562.096</b>	<b>2.937.904</b>	<b>100.00</b>	<b>99,41</b>
1	Survei dan Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) Statistik Sektoral	148.400.000	147.705.664	694.336	100.00	99,53
2	Pengumpulan, Updating, Evaluasi dan Analisis, Dimensi Layanan Statistik Sektoral	143.510.000	143.280.970	229.030	100.00	99,84
3	Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan Komunikasi Pemprov Sulsel	130.500.000	129.909.000	591.000	100.00	99,54
4	Forum Koordinasi dan Kerjasama Statistik Sektoral	81.090.000	79.666.462	1.423.538	100.00	98,24
<b>Adanya anggaran dari beberapa rekening yang tidak sepenuhnya direalisasikan</b>						
<b>6</b>	<b>Pengembangan/Pemeliharaan Prasarana dan Pengawasan Bidang Kominfo, Media Massa, POS dan Telekomunikasi</b>	<b>6.141.280.000</b>	<b>5.955.080.124</b>	<b>186.199.876</b>	<b>100.00</b>	<b>96,96</b>
1	Literasi Pengguna Media Sosial	615.300.000	608.873.000	6.427.000	100.00	98,95
2	Pengelolaan Opini Publik	85.250.000	85.250.000	0	100.00	100,00
3	Bimtek Peningkatan Sumber Daya Pengelola Komunikasi	232.750.000	232.383.547	366.453	100.00	99,84
4	Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Komunikasi	96.275.000	96.049.000	226.000	100.00	99,76
5	Layanan dan Pengelolaan Informasi	126.875.000	99.606.700	27.268.300	100.00	78,50
6	Pengelolaan Integrasi Sistem Informasi	145.725.000	121.176.600	24.548.400	100.00	83,15
7	Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan	2.304.980.000	2.239.120.174	65.859.826	100.00	97,14
8	Pelaksanaan PPID	115.500.000	108.201.500	7.298.500	100.00	93,68
9	Bimtek Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi	49.000.000	49.000.000	0	100.00	100,00
10	Layanan Jaring Komunikasi Sandi Daerah Prov. Sulsel	220.100.000	216.174.500	3.925.500	100.00	98,21
11	Pemenuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sandi	229.600.000	226.919.737	2.680.263	100.00	98,83
12	Penata Laksanaan Kegiatan UPTD Pelayanan Penyiaran Daerah	1.410.425.000	1.382.266.770	28.158.230	100.00	98,00
13	Sosialisasi Tentang Regulasi Penyiaran	175.850.000	175.850.000	0	100.00	100,00
14	Edukasi Tentang Pengelolaan TV Kabel	97.850.000	97.850.000	0	100.00	100,00
15	Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian pada Kab/Kota se-Sulsel	235.800.000	216.358.596	19.441.404	100.00	91,75

## **2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan**

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan adalah di karenakan kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai, adanya pergeseran jadwal kegiatan sehingga waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian kegiatan menjadi lebih singkat. Waktu pelaksanaan APBD Perubahan yang singkat; Penetapan waktu pengajuan permintaan penggantian dan penambahan dana/uang yang singkat dengan waktu pengesahan APBD Perubahan.

**BAB III**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN PROV. SULSEL**

**3.1 Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Laporan Keuangan**

**3.1.1 BELANJA**

Tahun 2017		%
Anggaran	Realisasi	
12.812.000.000	12.542.654.475	97,89
Tahun 2016		
Anggaran	Realisasi	
0	0	0

Informasi Pada Tahun Anggaran 2017 Belanja Daerah direncanakan sebesar **Rp. 12.812.000.000** sampai dengan pelaksanaan akhir tahun 2017 dapat direalisasikan sebesar **Rp. 12.542.654.475** atau **97,89%**, yang berarti terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 269.345.525**. Tidak terserapnya belanja tersebut disebabkan oleh adanya anggaran dari beberapa rekening yang tidak sepenuhnya direalisasikan.

tentang rincian dan penjelasan pos Belanja Daerah yang terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1.	Belanja Operasi	12.812.000.000	12.542.654.475	97,89	0
	<b>Jumlah</b>	<b>12.812.000.000</b>	<b>12.542.654.475</b>	<b>97,89</b>	<b>0</b>

**3.1.1.1 Belanja Operasi**

Tahun 2017		Tahun 2016
Anggaran	Realisasi	Realisasi
12.812.000.000	12.542.654.475	0

Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp. **12.812.000.000** dapat direalisasikan sebesar Rp. **12.542.654.475** atau **97,89%**, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. **269.345.525**.

Belanja Operasi terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1.	Belanja Pegawai	2.029.035.000,00	1.964.260.000,00	96	0
2.	Belanja Barang	9.025,419.000,00	8.845.352.275,00	98	0



3.	Belanja Modal	1.757.546.000,00	1.733.042.200,00	98	0
	<b>Jumlah</b>	<b>12.812.000.000,00</b>	<b>12.542.654.575,00</b>	<b>97,89</b>	<b>0</b>

#### 3.1.1.1.1 Belanja Pegawai

Tahun 2017		Tahun 2016	
Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.029.035.000,00	1.964.260.000,00	0	0

Belanja Pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan T.A. 2017 sebesar **Rp. 2.029.035.000,00** dapat direalisasi sebesar **Rp. 1.964.260.000,00** atau **96 %** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 64.775.000,00**.

Rincian belanja pegawai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1.	Honorarium PNS	1.829.010.000,00	1.764.750.000,00	96	0,00
2.	Uang Lembur	200.025.000,00	199.510.000,00	99	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.029.035.000,00</b>	<b>1.964.260.000,00</b>	<b>96</b>	<b>0,00</b>

#### 3.1.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Tahun 2017		Tahun 2016	
Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
9.025.419.000,00	8.845.352.275,00	0,00	0,00

Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan direncanakan sebesar **Rp. 9.025.419.000,00** dapat direalisasi sebesar **Rp. 8.845.352.275,00** atau **98 %** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 180.066.725,00**. Rincian belanja barang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Bahan Pakai Habis	833.354.000,00	829.948.800,00	99,00	0,00
2	Belanja Jasa Kantor	3.153.800.000,00	3.097.691.987,00	98,00	0,00
3	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	329.025.000,00	250.235.845,00	76,00	0,00
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	372.897.000,00	368.835.350,00	98,00	0,00

5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	94.500.000,00	90.000.000,00	95,00	0,00
6	Belanja Makan Dan Minum	936.785.000,00	933.146.300,00	99,00	0,00
7	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Perjalanan Dinas	2.708.908.000,00	2.649.153.993,00	97,00	0,00
10	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	65.250.000,00	65.250.000,00	100,00	0,00
11	Belanja Pemeliharaan	530.900.000,00	529.590.000,00	99,00	0,00
12	Belanja Jasa Konsultasi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>9.025.419.000,00</b>	<b>8.813.852.275,00</b>	<b>97,00</b>	<b>0,00</b>

Terdapat selisih antara beban dan belanja barang dan jasa sebesar **Rp. 8.813.852.275,00** yang seharusnya **Rp. 8.845.352.275,00**, dikarenakan kesalahan pembebanan pada belanja pegawai yang seharusnya dibebankan pada belanja barang dan jasa sebesar **Rp. 31.500.000,00**.

### 3.1.1.2 Belanja Modal

Tahun 2017		Tahun 2016
Anggaran	Realisasi	Realisasi
1.757.546.000,00	1.733.042.200,00	0,00

Belanja Modal pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan direncanakan sebesar **Rp. 1.757.546.000,00** dapat direalisasikan sebesar **Rp. 1.733.042.200,00** atau **98 %** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 24.503.800,00**

Rincian belanja Modal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1.	Belanja Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	933.000.000	911.017.200	97	0,00
2.	Belanja Pengadaan Perlengkapan Kantor	20.000.000	20.000.000	100	0,00
3.	Belanja Pengadaan Komputer	513.696.000	512.525.000	99	0,00
4.	Belanja Pengadaan Alat-alat Studio	35.100.000	35.000.000	99	0,00
5.	Belanja Pengadaan Alat-alat Komunikasi	97.000.000	97.000.000	0,00	0,00
6.	Belanja Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	25.000.000	24.500.000	98	0,00

7.	Belanja Aset Lainnya	118.750.000	118.000.000	99	0,00
8.	Belanja Pengadaan/Pembelian/Konstruksi/Bangunan/Alat-alat Informasi	15.000.000	15.000.000	100	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.757.546.000</b>	<b>1.733.042.200</b>	<b>98</b>	<b>0,00</b>

### 3.1.1.2.1 Belanja Peralatan dan Mesin

Tahun 2017		Tahun 2016
Anggaran	Realisasi	Realisasi
1.598.796.000	1.575.542.000	0,00

Belanja peralatan dan mesin pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan direncanakan sebesar **Rp. 1.598.796.000,00** dapat direalisasikan sebesar **Rp. 1.575.542.000,00** atau **98 %**.

Rincian belanja Peralatan dan mesin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2016			Tahun 2015
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1.	Belanja Modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor	933.000.000	911.017.200	97,00	0,00
2	Belanja Modal pengadaan peralatan kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal pengadaan perlengkapan kantor	20.000.000	20.000.000	100	0,00
4	Belanja Modal pengadaan komputer	513.696.000	512.525.000	99,00	0,00
5	Belanja Modal pengadaan mebeulair	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal pengadaan alat-alat studio	35.100.000	35.000.000	99,00	0,00
8.	Belanja Modal pengadaan alat-alat komunikasi	97.000.000	97.000.000	100	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.598.796.000</b>	<b>1.575.542.200</b>	<b>98,00</b>	<b>0,00</b>

### 3.1.2 BEBAN – LO

Tahun 2017	Tahun 2016
<b>11.580.698.939,00</b>	<b>0,00</b>

Beban Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 11.580.698.939,00** Beban periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Informasi tentang rincian dan penjelasan pos beban yang terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1.	Beban Operasi	11.580.698.939,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>11.580.698.939,00</b>	<b>0,00</b>

### 3.1.2.1 Beban Operasi

Tahun 2017	Tahun 2016
<b>11.580.698.939,00</b>	<b>0,00</b>

Beban Operasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 11.580.698.939,00**. Beban operasi terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1.	Beban Pegawai	2.018.430.000,00	0,00
2.	Beban Persediaan	2.080.798.250,00	0,00
3.	Beban Jasa	3.550.576.310,00	0,00
4.	Beban Pemeliharaan	529.590.000,00	0,00
5.	Beban Perjalanan Dinas	2.649.153.993,00	0,00
6.	Beban Penyusutan	752.150.386,00	0,00
7.	Beban Lain-Lain	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>11.580.698.939,00</b>	<b>0,00</b>

Terdapat perbedaan antara beban operasi di Laporan Operasional dengan belanja operasi di Laporan Realisasi Anggaran sebesar **Rp. 771.086.664,00** dimana Beban Operasi sebesar **Rp. 11.580.698.939,00** sedangkan Belanja Operasi sebesar **Rp. 10.809.612.275,00**. Selisih tersebut sebagai berikut:

- Terdapat penambahan Beban Jasa sebesar **Rp. 3.386.846,00** yang timbul akibat pengakuan beban atas utang beban jasa berupa tagihan listrik dan Telepon periode Desember 2017. (*daftar utang terlampir*)
- Pengakuan beban penyusutan sebesar **Rp. 752.150.386,00** selama periode tahun 2017.
- Terdapat Beban persediaan sebesar **Rp. 2.390.000,00** periode 31 Desember 2017 yang belum terpakai (*stok opname terlampir*)
- Terdapat Beban Pegawai sebesar **Rp. 22.670.00,00** atas pelunasan/ pembayaran utang beban gaji dan tunjangan tahun 2017 berupa kekurangan kekurangan tunjangan jabatan dan tunjangan pengamanan persandian tahun 2017.

#### 3.1.2.1.1 Beban Pegawai

Tahun 2017	Tahun 2016
<b>1.995.760.000,00</b>	<b>0,00</b>

Beban Pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp. **1.995.760.000,00** yang terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1.	Beban Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00
2.	Beban Tambahan Penghasilan PNS	0,00	0,00
3.	Honorarium PNS	1.094.250.000,00	0,00
4.	Honorarium Non PNS	702.000.000,00	0,00
5.	Uang Lembur	199.510.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.995.760.000,00</b>	<b>0,00</b>

### 3.1.2.1.2 Beban Persediaan

Tahun 2017	Tahun 2016
<b>2.080.798.250,00</b>	<b>0,00</b>

Beban Persediaan merupakan nilai beban persediaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp. **2.077.925.250,00** yang terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1.	Beban Bahan Pakai Habis Beban Bahan Bakar	828.943.800,00	0,00
2.	Minyak/Gas/Pelumas	147.890.650,00	0,00
3.	Beban Cetak	170.817.500,00	0,00
4.	Beban Makanan dan Minuman	933.146.300,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.080.798.250,00</b>	<b>0,00</b>

### 3.1.2.1.3 Beban Jasa

Tahun 2017	Tahun 2016
<b>3.550.576.310,00</b>	<b>0,00</b>

Beban jasa merupakan nilai beban jasa periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp. **3.550.576.310,00** yang terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1.	Beban Jasa Kantor	3.094.963.265,00	0,00
2.	Beban Penggandaan	198.017.850,00	0,00
3.	Beban Jasa Konsultasi	0,00	0,00
4.	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	65.250.000,00	0,00
6.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	102.345.195,00	0,00
7.	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	90.000.000,00	0,00
8.	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00
9.	Beban Pakaian Khusus dan Hari Hari Tertentu	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.550.576.310,00</b>	<b>0,00</b>

#### 3.1.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Tahun 2017	Tahun 2016
<b>529.590.000,00</b>	<b>0,00</b>

Beban pemeliharaan merupakan nilai beban pemeliharaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar sebesar Rp. **529.590.000,00** yang terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	310.590.000,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	194.000.000,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Aset Lainnya	25.000.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>529.590.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### 3.1.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Tahun 2017	Tahun 2016
<b>2.649.153.993,00</b>	<b>0,00</b>

Beban perjalan dinas merupakan beban perjalanan dinas periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp. **2.649.153.993,00** yang terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.379.893.200,00	0,00
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.269.260.793,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.649.153.993,00</b>	<b>0,00</b>

#### 3.1.2.1.6 Beban Penyusutan

Tahun 2017	Tahun 2016
<b>752.150.386,00</b>	<b>0,00</b>

Beban penyusutan merupakan nilai beban penyusutan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 Rp. **752.150.386,00** yang terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	748.302.803,00	0,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	220.000,00	0,00
3	Beban Penyusutan Jalan	1.762.750,00	0,00
4	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	1.864.833,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>752.150.386,00</b>	<b>0,00</b>

### 3.1.3 ASET

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>4.392.952.535,00</b>	<b>444.046.261,00</b>

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber yang dipelihara kerana alasan sejarah dan budaya, yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Aset Lancar	5.263.000,00	1.385.000,00
2	Aset Tetap	4.116.692.035,00	417.461.261,00
3	Aset Lainnya	270.997.500,00	25.200.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.392.952.535,00</b>	<b>444.046.261,00</b>

#### 3.1.3.1 Aset lancar

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>1.385.000,00</b>	<b>21.050.000,00</b>

Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, piutang lainnya dan persediaan. Nilai Aset Lancar Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. **5.263.000,00** dan Rp **1.385.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
2	Persediaan	5.263.000,00	1.385.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.263.000,00</b>	<b>1.385.000,00</b>

##### 3.1.3.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,00,

### 3.1.3.1.2 Persediaan

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>5.263.000,00</b>	<b>1.385.000,00</b>

Persediaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. **5.263.000,00** (*daftar opname persediaan terlampir*). Pada Posisi 31 Desember 2017 terjadi kenaikan saldo persediaan sebesar Rp. **3.878.000,00** dari posisi persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp. **1.385.000,00** Persediaan terdiri dari persediaan bahan pakai habis, bahan pakai habis adalah bahan yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi, persediaan bahan pakai habis terdiri atas Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Persediaan bahan kebersihan. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Persediaan ATK	4.863.000,00	985.000,00
2	Persediaan bahan kebersihan	400.000,00	400.000,00
3	Persediaan bahan cetakan	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.263.000,00</b>	<b>1.385.000,00</b>

### 3.1.3.2 Aset Tetap

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>4,116,692,035.00</b>	<b>417,461,261.00</b>

Aset tetap adalah aset berwujud mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. **4,116,692,035.00** dan 2016 sebesar Rp. **417,461,261.00** dengan rincian sebagai berikut:

Terlampir pada Tabel .. ( Kertas Kerja Aset )

#### 3.1.3.2.1 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>7,726,481,266.00</b>	<b>827,830,366.00</b>

Peralatan dan Mesin Merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 sebesar Rp. **7,726,481,266.00** yang terdiri dari:

Terlampir pada Tabel .. ( Kertas Kerja Aset )

##### 3.1.3.2.1.1 Alat-alat Angkutan

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>1,088,012,800.00</b>	<b>90,020,000.00</b>



Alat-alat Angkutan Merupakan nilai Alat-alat angkutan per 31 Desember 2017 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2017	Rp.	90,020,000.00
Realisasi Belanja Modal T.A. 2017	Rp.	911.017.200,00
Penyesuaian bertambah atas Mutasi	Rp.	<u>86,975,600.00</u>
<b>Jumlah</b>	Rp.	<b>1,088,012,800.00</b>

- *Penyesuaian bertambah atas Mutasi Aset dari Biro Humas dan Protokol berdasarkan BA Mutasi Barang No.028/908/VI/Humas tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp. 46,935,000.00.*
- *Penyesuaian bertambah atas Mutasi Aset dari Biro Pengelolaan Aset Daerah (Eks Biro Kerjasama) berdasarkan BA Mutasi Barang No.225.c/VII-2017/B.Aset tanggal 3 Juli 2017 sebesar Rp. 40,040,600.00.*

### 3.1.3.2.1.2 Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>4,135,493,466.00</b>	<b>694,410,366.00</b>

Alat-alat kantor dan rumah tangga Merupakan nilai Alat-alat kantor dan rumah tangga per 31 Desember 2017 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2016	Rp.	694,410,366.00
Realisasi Belanja Modal T.A. 2017	Rp.	547,525,000.00
Penyesuaian bertambah atas Mutasi	Rp.	<u>2,893,558,100.00</u>
<b>Jumlah</b>	Rp.	<b>4,135,493,466.00</b>

- *Penyesuaian bertambah atas Mutasi Aset dari Biro Humas dan Protokol berdasarkan BA Mutasi Barang No.028/908/VI/Humas tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp. 860,587,600.00.*
- *Penyesuaian bertambah atas Mutasi Aset dari Biro Pengelolaan Aset Daerah berdasarkan BA Mutasi Barang No.225.c/VII-2017/B.Aset tanggal 3 Juli 2017 sebesar Rp. 1,348,485,500.00.*
- *Penyesuaian bertambah atas Mutasi Aset dari Biro Pengelolaan Aset Daerah berdasarkan BA Mutasi Barang No.226.d/VII-2017/B.Aset tanggal 3 Juli 2017 sebesar Rp. 684,485,000.00.*

### 3.1.3.2.1.3 Alat-Alat Studio dan Komunikasi

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>2,303,190,000.00</b>	<b>43,400,000.00</b>

Alat-alat studio dan komunikasi Merupakan nilai Alat-alat studio dan komunikasi per 31 Desember 2017 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2017	Rp.	43,400,000.00
Realisasi Belanja Modal T.A. 2017	Rp.	132,000,000.00
Penyesuaian bertambah atas Mutasi	Rp.	<u>2,127,790,000.00</u>
<b>Jumlah</b>	Rp.	<b>2,303,190,000.00</b>

- *Penyesuaian bertambah atas Mutasi Aset dari Biro Humas dan Protokol berdasarkan BA Mutasi Barang No.028/908/VI/Humas tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp. 2,014,420,000.00.*
- *Penyesuaian bertambah atas Mutasi Aset dari Biro Pengelolaan Aset Daerah berdasarkan BA Mutasi Barang No.225.c/VII-2017/B.Aset tanggal 3 Juli 2017 sebesar Rp. 76,020,000.00.*
- *Penyesuaian bertambah atas Mutasi Aset dari Biro Pengelolaan Aset Daerah berdasarkan BA Mutasi Barang No.226.d/VII-2017/B.Aset tanggal 3 Juli 2017 sebesar Rp. 37,350,000.00.*

### 3.1.3.2.1.2 Alat-Alat Keamanan

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>107,385,000.00</b>	<b>0.00</b>

Alat-alat Keamanan Merupakan nilai Alat-alat Keamanan per 31 Desember 2017 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2017	Rp.	0.00
Realisasi Belanja Modal T.A. 2017	Rp.	0.00
Penyesuaian bertambah atas Mutasi	Rp.	107,385,000.00
<b>Jumlah</b>	Rp.	<b>107,385,000.00</b>

- *Penyesuaian bertambah atas Mutasi Aset dari Biro Humas dan Protokol berdasarkan BA Mutasi Barang No.028/908/VI/Humas tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp. 77,385,000.00.*
- *Penyesuaian bertambah atas Mutasi Aset dari Biro Pengelolaan Aset Daerah berdasarkan BA Mutasi Barang No.225.c/VII-2017/B.Aset tanggal 3 Juli 2017 sebesar Rp. 30,000,000.00.*

### 3.1.3.2.2 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>107,385,000.00</b>	<b>0.00</b>

#### Bangunan Gedung

Bangunan gedung merupakan nilai bangunan gedung per 31 Desember 2017 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2017	Rp.	0.00
Realisasi Belanja Modal T.A. 2017	Rp.	0.00
Penyesuaian bertambah atas Mutasi	Rp.	11,000,000.00
<b>Jumlah</b>	Rp.	<b>11,000,000.00</b>

Terlampir pada Tabel .. ( Kertas Kerja Aset )

- *Penyesuaian bertambah atas Mutasi Aset dari Biro Pengelolaan Aset Daerah berdasarkan BA Mutasi Barang No.226.d/VII-2017/B.Aset tanggal 3 Juli 2017 sebesar Rp. 11,000,000.00.*

### 3.1.3.2.3 Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>95,010,000.00</b>	<b>0.00</b>

Jalan, Irigasi dan Jembatan Merupakan nilai Jalan dan Jembatan, Instalasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 95,010,000.00 yang terdiri dari:

**Terlampir pada Tabel .. ( Kertas Kerja Aset )**

#### 3.1.3.2.3.2 Instalasi

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>24,500,000.00</b>	<b>0.00</b>

Instalasi merupakan nilai instalasi per 31 Desember 2017 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2017	Rp.	0.00
Realisasi Belanja Modal T.A. 2017	Rp.	<u>24,500,000.00</u>
<b>Jumlah</b>	Rp.	<b>24,500,000.00</b>

#### 3.1.3.2.3.3 Jaringan

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>70,510,000.00</b>	<b>0.00</b>

Jaringan merupakan nilai Jaringan per 31 Desember 2017 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2017	Rp.	0.00
Realisasi Belanja Modal T.A. 2017	Rp.	0.00
Penyesuaian bertambah atas Mutasi	Rp.	<u>70,510,000.00</u>
<b>Jumlah</b>	Rp.	<b>70,510,000.00</b>

- *Penyesuaian bertambah atas Mutasi Aset dari Biro Humas dan Protokol berdasarkan BA Mutasi Barang No.028/908/VI/Humas tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp. 70,510,000.00.*

#### 3.1.3.2.4 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>

Aset tetap lainnya merupakan nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp. **5.000.000,00** yaitu:

**Terlampir pada Tabel .. ( Kertas Kerja Aset )**

#### Buku dan Perpustakaan

Buku dan perpustakaan merupakan nilai buku dan perpustakaan per 31 Desember 2017 yaitu:

Saldo Awal 1 Januari 2017	Rp.	<b>5.000.000,00</b>
Realisasi Belanja Modal T.A. 2017	Rp.	<u>0,00</u>
<b>Jumlah</b>	Rp.	<b>5.000.000,00</b>

#### 3.1.3.2.5 Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>3,720,799,231.00</b>	<b>415,369,105.00</b>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penyusutan nilai aset tetap sebagai dasar Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap serta Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai akumulasi penyusutan aset tetap Per 31 Desember 2017 sebesar Rp.3,720,799,231.00 terdiri dari :

**Terlampir pada Tabel .. ( Kertas Kerja Akumulasi Penyusutan Aset Tetap )**

#### 3.1.3.2.5.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>3,673,838,523.00</b>	<b>415,369,105.00</b>

Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin merupakan nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2017 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2017	Rp.	415,369,105.00
Penyusutan Tahun 2017	Rp.	748,302,803.00
Penyesuaian bertambah atas Mutasi	Rp.	<u>2,510,166,615.00</u>
<b>Jumlah</b>	Rp.	<b>3,673,838,523.00</b>

- *Penyesuaian bertambah atas Mutasi Aset dari Biro Humas dan Protokol berdasarkan BA Mutasi Barang No.028/908/VI/Humas tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp. 1,635,474,812.00.*
- *Penyesuaian bertambah atas Mutasi Aset dari Biro Pengelolaan Aset Daerah berdasarkan BA Mutasi Barang No.225.c/VII-2017/B.Aset tanggal 3 Juli 2017 sebesar Rp. 152,856,803.00.*
- *Penyesuaian bertambah atas Mutasi Aset dari Biro Pengelolaan Aset Daerah berdasarkan BA Mutasi Barang No.226.d/VII-2017/B.Aset tanggal 3 Juli 2017 sebesar Rp. 721,835,000.00.*

### 3.1.3.2.5.2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>733,333.00</b>	<b>0.00</b>

Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan merupakan nilai akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2017	Rp.	0.00
Penyusutan Tahun 2017	Rp.	220,000.00
Penyesuaian bertambah atas Mutasi	Rp.	<u>513,333.00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>733,333.00</b>

- *Penyesuaian bertambah atas Mutasi Aset dari Biro Pengelolaan Aset Daerah berdasarkan BA Mutasi Barang No.226.d/VII-2017/B.Aset tanggal 3 Juli 2017 sebesar Rp. 513,333.00.*

### 3.1.3.2.5.3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>46,227,375.00</b>	<b>0.00</b>

Akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan nilai akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2017	Rp.	0.00
Penyusutan Tahun 2017	Rp.	3,627,583.00
Penyesuaian bertambah atas Mutasi	Rp.	<u>42,599,792.00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>46,227,375.00</b>

- *Penyesuaian bertambah atas Mutasi Aset dari Biro Humas dan Protokol berdasarkan BA Mutasi Barang No.028/908/VI/Humas tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp. 42,599,792.00.*

### 3.1.3.3 Aset Lainnya

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>270,997,500.00</b>	<b>25,200,000.00</b>

Aset Lainnya merupakan nilai asset lainnya per 31 Desember 2017 yaitu :

**Terlampir pada Tabel .. ( Kertas Kerja Aset )**

### 3.1.3.3.1 Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud merupakan nilai asset tak berwujud per 31 Desember 2017 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2017	Rp.	25,200,000.00
Realisasi Belanja Modal T.A. 2017	Rp.	118,000,000.00
Penyesuaian bertambah atas Mutasi	Rp.	<u>127,797,500.00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>270,997,500.00</b>

- *Penyesuaian bertambah atas Mutasi Aset dari Biro Humas dan Protokol berdasarkan BA Mutasi Barang No.028/908/VI/Humas tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp. 127,797,500.00.*

### 3.1.4 KEWAJIBAN

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>26.056.846,00</b>	<b>6.115.568,00</b>

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah yang terdiri dari :

No	Jenis Kewajiban	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Kewajiban Jangka Pendek	26.056.846,00	6.115.568,00
<b>Jumlah</b>		<b>26.056.846,00</b>	<b>6.115.568,00</b>

#### 3.1.4.2 Kewajiban Jangka Pendek

##### Utang Beban

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>26.056.846,00</b>	<b>6.115.568,00</b>

Utang beban merupakan nilai utang beban per 31 Desember 2017 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2017	Rp.	0,00
Utang Beban Listrik, Telepon, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Khusus, T.A. 2016	Rp.	<u>26.056.846,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>26.056.846,00</b>

### 3.1.5 EKUITAS

31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>15.017.714.948,00</b>	<b>3.437.016.009,00</b>

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah.

#### Ekuitas - LPE

Ekuitas merupakan nilai ekuitas per 31 Desember 2017 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2017	Rp.	(3.437.016.009,00)
Surplus/Defisit LO T.A. 2017	Rp.	(11.580.698.939,00)
Dampak Kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan Mendasar :		
- Rekening Konsolidasi (RK)	Rp.	0,00
- Koreksi Penyusutan Aset Tetap	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan - Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp.	<u>0,00</u>
<b>Jumlah Ekuitas - LPE</b>	<b>Rp.</b>	<b>(15.017.714.948,00)</b>

#### RK PPKD

- SP2D-LS	Rp.	1.733.042.200,00
- SP2D UP/GU/TU	Rp.	<u>9.937.952.275,00</u>
Jumlah Penerimaan RK PPKD	Rp.	12.542.654.475,00
Pengeluaran RK PPKD		
- Pengembalian Sisa Kas	Rp.	<u>269.345.525,00</u>
Jumlah Pengeluaran RK PPKD	Rp.	<u>(269.345.525,00)</u>
Jumlah RK PPKD	<b>Rp.</b>	<b>19.381.737.637,00</b>
<b>Jumlah Ekuitas Akhir Neraca</b>	<b>Rp.</b>	<b>4.364.022.689,00</b>

### 3.2 Pengungkapan Atas Pos Pos Asset dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja Serta Rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

#### 3.2.1 Utang Beban

Utang beban timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas belanja Listrik dan Telepon pada periode Desember 2017 yang terdiri dari :

JENIS UTANG	SALDO	KET.
- Utang Tunjangan Jabatan	11.770.000	Suryaningsih, SE., MM.
- Utang Tunjangan Jabatan	2.880.000	Patarai A. Burhan GS, S.Sos.MM
- Utang Tunjangan Jabatan	1.420.000	Abd. Mukminin, SE
- Utang Tunjangan Khusus	3.300.000	Abdi Rahmat, SH
- Utang Tunjangan Khusus	3.300.000	Drs. Anwar
- Utang Beban Jasa Telepon	800.775	Beban Periode Desember 2017
- Utang Beban Jasa Listrik	2.586.071	Beban Periode Desember 2017
<b>JUMLAH</b>	<b>26.056.846</b>	

**BAB IV**  
**PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROV. SULSEL**

**4.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Statistik dan Persandian Prov. Sulsel**

Dinas Komunikasi Statistik dan Persandian Prov. Sulsel (Diskominfo-SP) berlokasi di Jalan Urif Sumohardjo Kota Makassar, Tlp. 0411-453203 Fax 0411-453489. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sul-Sel No. 83 Tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, menyiapkan, dan memfasilitasi pelayanan teknis operasional dan administratif untuk mendukung Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangannya di semua bidang, maka dapat disampaikan susunan organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
  - Kepala Sub. Bagian Program
  - Kepala Sub. Bagian Umum, Kepagawaian dan Hukum
  - Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Bidang Komunikasi Publik
  - Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik
  - Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik
  - Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Komunikasi
4. Kepala Bidang Informatika
  - Kepala Seksi Layanan Informasi Publik
  - Kepala Seksi Pengelolaan Integrasi Sistem Informasi
  - Kepala Seksi Sumber Daya Manusia dan Hubungan Kerjasama Antar Lembaga
5. Kepala Bidang Statistik Sektoral
  - Kepala Seksi Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral
  - Kepala Seksi Koordinasi dan Kerjasama Statistik Sektoral
  - Kepala Seksi Evaluasi dan Analisis, Disaminasi Layanan Statistik Sektoral
6. Kepala Bidang Persandian
  - Kepala Seksi Tata Kelola Persandian
  - Kepala Seksi Operasional Pengamanan Persandian
  - Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian
7. Kepala Bidang Layanan e-Government dan Pengelolaan Data Elektronik
  - Kepala Seksi Piranti Lunak dan Pengembangan Aplikasi
  - Kepala Seksi Pengolahan Data Informasi dan e-Government
  - Kepala Seksi Piranti Keras dan Infrastruktur Jaringan



## 8. Kelompok Jabatan Fungsional

### 4.2 Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulsel merupakan amanah UU 23/2014 sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulsel merupakan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Provinsi.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulsel diatur secara umum dalam UU 23/2014 yang termuat dalam pasal 4:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
2. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian;
  - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian;
  - d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.
3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Komunikasi Publik, Informatika, Statistik, Persandian dan Layanan e-Government;
  - g. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis Bidang Komunikasi Publik, Informatika, Statistik, Persandian dan Layanan e-Government;
  - h. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum Bidang Komunikasi Publik, Informatika, Statistik, Persandian, dan Layanan e-Government;
  - i. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis Bidang Komunikasi Publik, Informatika, Statistik, Persandian dan Layanan e-Government;

- j. Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
- k. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan informasi dan komunikasi public pemerintah Daerah;
- l. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan aplikasi informatika di lingkungan pemerintah Daerah;
- m. Menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah Daerah;
- n. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan statistik sektoral di lingkup Provinsi;
- o. Menyelenggarakan fasilitasi dan pelayanan dalam rangka mendukung penyelenggaraan penyiaran daerah;
- p. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- q. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- s. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4.3 Sumber Daya SKPD**

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 Orang Sekretaris Dinas, 5 orang Kepala Bidang, 2 Orang Kepala UPT, 24 orang Kepala Seksi, dan 103 orang staf yang profesional dibidangnya masing-masing, dengan strata sebaran pendidikan (SLTA) 3 orang, (Strata 1 (S1) 11 orang dan Strata 2 (S2) 4 orang dengan latar belakang keilmuan yang berbeda-beda.

#### **4.4 Visi dan Misi**

##### **1. Visi**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah harus berperan dan berkarya agar konsisten dan dapat eksist, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita-cita yang ingin di wujudkan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah dengan mengacu pada batasan tersebut, adapun visi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan adalah :  
*“Mewujudkan Masyarakat Informasi untuk Sulsel lebih Maju, Mandiri dan Modern”*

##### **2. Misi**

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, dirumuskan Misi yang merupakan acuan

angka-angka yang akan dilakukan, yakni Misi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Daerah
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi public
- c. Mewujudkan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Melalui Persandian

#### **4.5 Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan**

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai beberapa kegiatan selama tahun anggaran 2017 yaitu;

##### **a. Program pelayanan administrasi perkantoran**

- Penyediaan jasa administrasi dan komunikasi perkantoran dan pakai habis
- Pengelolaan Administrasi Persuratan dan Kepegawaian
- Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana
- Penatausahaan Administrasi SKPD
- Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
- Pengelolaan Keuangan dan Program Kegiatan
- Forum SKPD
- Pengelolaan Data dan Informasi
- Penyajian data dan Informasi Melalui Website
- Pemanfaatan dan Pengembangan Infrastruktur Jaringan
- Pemeliharaan Layanan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik
- Bimtek Pengelolaan Website
- Sosialisasi Tentang E-Government
- Penyediaan Jasa Bandwidth Internet
- Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
- Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik
- Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Sistem Pelaporan Pakart Report
- Pengembangan Layanan LPSE
- Survei dan Kompilasi Orodok Administrasi (Kompromin) Statistik Sektoral
- Pengumpulan, Updating, Evaluasi dan Analisis, Dimensi Layanan Statistik Sektoral

- Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan Komunikasi Pemprov Sulsel
- Forum Koordinasi dan Kerjasama Statistik Sektoral
- Literasi Penggunaan Media Ssial
- Pengelolaan Opini Publik
- Bimtek Peningkatan Sumber daya Pengelolaan Komunikasi
- Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Komunikasi
- Layanan dan Pengelolaan Informasi
- Pengelolaan Integrasi Sistem Informasi
- Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan
- Pelaksanaan PPID
- Bimtek Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID)
- Layanan Jaringan Komunikasi Sandi Daerah Prov. Sulsel
- Pemenuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sandi
- Penata Laksanaan Kegiatan UPTD Pelayanan Penyiaran Daerah
- Sosialisasi Tentang Regulasi Penyiaran
- Edukasi Tentang Pengelolaan TV Kabel
- Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian Pada Kab/Kota Se-Sulsel

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Catatan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Statistik dan Persandian Prov. Sulsel Tahun 2017 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Komunikasi Statistik dan Persandian Prov. Sulsel Tahun 2017 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif analisis atau daftar terperinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas serta Neraca. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Statistik dan Persandian Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2017.

Makassar, 14 Februari 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK  
DAN PERSANDIAN PROV. SULSEL

**Ir. H. ANDI HASDULLAH, M.Si.**

Nip : 19610420 198603 1 022